

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

PERJANJIAN KINERJA
ESELON II

NAMA
NIP
PANGKAT / GOL.
JABATAN / KELAS JABATAN
PERANOKAT DAERAH
TAHUN

: DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
: 196409171990031013
: PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 13
: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	75
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100
2	Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks stabilitas	89
3	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	5
4	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	85
5	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan potensi konflik di Kota Pasuruan	20

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.186.592.700	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 27.874.893.968	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 188.861.400	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 497.385.600	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.081.719.900	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.524.520.819	
Jumlah		Rp 37.353.974.387	

Mengetahui,
 Pejabat Atasasn Langsung
 WALI KOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK

DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
 NIP. 196409171990031013

ESELON II

DRS. H. HARDI UTOYO, M. SI

196409171990031013

PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 13

BADAN KESATUJUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

[illegible]

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.186.592.700	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 27.874.893.968	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 188.861.400	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 497.385.600	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.081.719.900	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.524.520.819	
Jumlah		Rp 37.353.974.387	

Mengelahi,
Pejabat Atasn Langsung
WALI KOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
Jabatan : PLT. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 January 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK


DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

Pihak Pertama,
PLT. SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP. 197005302003121004

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III

NAMA : MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP : 197005302003121004
PANGKAT / GOL. : PEMBINA / IV-A
JABATAN / KELAS JABATAN : Pjt. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 12
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	100
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik Daerah	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara	100
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5
12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16
16	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 44.543.700,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30.646.800,00	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.299.700,00	
4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.597.200,00	
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.512.158.454,00	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.458.253.654,00	
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.324.100,00	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 48.468.800,00	
9	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.111.900,00	
10	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.646.441.449,00	
11	Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Rp 34.820.400,00	
12	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.894.900,00	
13	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 171.513.200,00	
14	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 66.632.000,00	
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 357.728.650,00	
16	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 200.946.520,00	
JUMLAH		Rp 4.524.520.819,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasn Langsung
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


DRS.H. HARDI UTOYO, M.SI
NRP. 196409171990031013

Pasuruan, 2 January 2024

Pt. SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NRP. 197005302003121004

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

NAMA	:	MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP	:	197005302003121004
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA / IV-A
JABATAN / KELAS JABATAN	:	PLT. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 12
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN	:	2024

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME													JML												
				1		2		3		4		5		6		7			8		9		10		11		12		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	0		2		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		2	
12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1	
13	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		0		17	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan/ Semester/ Triwulan/ Bervarias SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Triwulan/ Semester SKPD	Laporan	0		0		10		0		0		13		0		13		13		1		1		10		16	
16	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Kegiatan Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		11	
CAPAIAN OUTPUT																													
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																													

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 44.543.700,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30.646.800,00	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.299.700,00	
4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.597.200,00	
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.512.158.454,00	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.458.253.654,00	
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.324.100,00	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Rp 48.468.800,00	
9	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.111.900,00	
10	Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Rp 34.820.400,00	
11	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.894.900,00	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
12	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 171.513.200,00	
13	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 66.632.000,00	
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 357.728.650,00	
15	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 200.946.520,00	
JUMLAH		Rp 4.524.520.819,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK


DES.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

Pasuruan, 2 January 2024

Pt. SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP. 197005302003121004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK


DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP. 197005302003121004

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III

NAMA : MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP : 197005302003121004
PANGKAT / COL. : PEMBINA / IV-A
JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI / 11
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	20
2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau	150
3	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1
4	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah ya	1
5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah pemilih pemula yang dibina	510

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	54
7	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 27.874.893,968,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 23.856.900,00	
3	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 27.565.124.468,00	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 50.601.900,00	
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Rp 23.378.600,00	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 211.932.100,00	
Jumlah		Rp 27.874.893.968,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasn Langsung
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

Pasuruan, 02 Januari 2024

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO,SE, MM
NIP. 197005302003121004

ESLON III

: MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
 : 197005302003121004
 : PEMERINTAH / IV-A
 : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI / I / 1
 : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 : 2024

[illegible]

NO		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME													%														
					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
7	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Partai, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Ketrampilan Berorganisasi, Perwakilan dan Peran Politik, Pendidikan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Partai, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Ketrampilan Berorganisasi, Perwakilan dan Peran Politik, Pendidikan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		
CAPAIAN OUTPUT																																
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 27.874,893,968,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 23.856,900,00	
3	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 27.565.124,168,00	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 50.601,900,00	
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp 23.378,600,00	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 211.932100,00	
Jumlah		Rp 27.874.893.168,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasn Langsung
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK



Drs.H. HARDI UTOYO,M.Si
NIP. 196409171990031013

Pasuruan, 02 Januari 2024

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM
NEGARI



FUHAMMA YUSUF LUKMANTO,SE, MM
NIP. 197005302003121004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIYONO, SH
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

Pihak Pertama,
PLT. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KEWASPADAAN NASIONAL

BUDIYONO, SH
NIP. 196707281989101001

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III

NAMA : BUDIYONO, SH
NIP : 196707281989101001
PANGKAT / GOL. : PEMBINA / IV-A
JABATAN / KELAS JABATAN : PLT. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL / 11
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Konflik	3
3	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Konflik yang dimediasi	75
5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3
6	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan diri, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan pertahanan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan diri, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan pertahanan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik	10718
7	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1
9	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	220
10	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1
11	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1
12	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	3
13	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	288
14	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga asing	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.186.592700,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah kebangsaan	Rp 15.036.100,00	
3	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah kebangsaan	Rp 41.951800,00	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah kebangsaan	Rp 1.082.052100,00	
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Rp 30.801800,00	
6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah kebangsaan	Rp 16.750900,00	
17	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.081.719900,00	
18	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp 16.501.700,00	
19	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 258.062.300,00	
20	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara	Rp 2.228.818.500,00	
21	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan, perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang	Rp 563.140.000,00	

NO	KEGIATAN	ANOGARAN	KETERANGAN
	kewaspedaan serta penanganan konflik di daerah		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKI asing dan lembaga asing	Rp 15.197.300,00	
	JUMLAH	Rp 4.268.312.600,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
NIP. 196409171990031013

Pasuruan, 02 Januari 2024

PLT. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KEWASPADAAN NASIONAL


BUDIYONO, SH
NIP. 196707281989101001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.186.592.700,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp 15.036.100,00	
3	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp 41.951.800,00	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1.082.052.100,00	
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 30.801.800,00	
6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp 16.750.900,00	
17	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.081.719.900,00	
18	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp 16.501.700,00	
19	Sub Kegiatan Penyusunan Balok Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 258.062.300,00	
20	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan Antar Negara	Rp 2.228.818.600,00	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
21	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelengkapan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Rp 563.140.000,00	
22	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga asing	Rp 15.197.300,00	
JUMLAH		Rp 4.268.312.600,00	

Mengetahui,
 Pejabat Atasasn Langsung
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK



Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
 NIP. 196409171990031013

Pasuruan, 02 Januari 2024

PLT. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
 WAWASAN KEBANGSAAN DAN
 KEWASPADAAN NASIONAL



BUDIYO, SH
 NIP. 196707281989101001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIYONO, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN KEMASYARAKATAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA
DAN KEMASYARAKATAN

DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013


BUDIYONO, SH
NIP. 196707281989101001

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III

NAMA
NIP
PANGKAT / GOL.
JABATAN / KELAS JABATAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN

: BUDIYONO, SH
: 196707281989101001
: PEMBINA / IV-A
: KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN KEMASYARAKATAN / I I
: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATANPROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORG	Persentase Peningkatan Organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	2
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi,sosial dan budaya yang aktif	20
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85
4	Perumusan kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat /Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3
6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155
7	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80
8	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
9	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000
10	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1
11	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1
12	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 188.861.400,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Rp 16.673.800,00	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp 125.382.700,00	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,	Rp 20.207.900,00	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 26.597.000,00	
6	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 497.385.600,00	
7	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 10.215.300,00	
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 23.902.400,00	
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 434.956.700,00	
10	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 28.311.200,00	
JUMLAH		Rp 686.247.000,00	

Mengetahui,
Pejabat Atas Langsung
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
NIP. 196409171990031013

Pasuruan, 02 Januari 2024
KEPALA BIDANG KETAHANAN
BANGSA DAN KEMASYARAKATAN


BUDDYONO, SH
NIP. 196707281989101001

ESELON III

: BUDIONO, SH
 : 196707281989101001
 : PEMBINA / IV-A
 : KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN KEMASYARAKATAN / I
 : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 : 2024

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME												%
				1		2		3		4		5		6		JML.
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
12	Pelaksanaan Ketahanan Ketahanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Kerukunan Umat Beragama dan Kepenghayan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Kerukunan Umat Beragama dan Kepenghayan di Daerah	orang	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
CAPAIAN OUTPUT																
% CAPAIAN KINERJA TIAP BIDANG																

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 188.861.400,00	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Rp 16.673.800,00	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp 125.382.700,00	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 20.207.900,00	
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 26.597.000,00	
6	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 497.385.600,00	
7	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Kerukunan Umat Beragama dan Kepenghayan di Daerah	Rp 10.215.300,00	
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Kerukunan Umat Beragama dan Kepenghayan di Daerah	Rp 23.902.400,00	
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Rp 434.956.700,00	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayaat Kepercayaan di Daerah		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayaat Kepercayaan di Daerah	Rp 28.311.200,00	
	JUMLAH	Rp 686.247.000,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasas Langsung
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


DRS. H. HARDI UTOYO, M.SI
NIP. 196409171990031013

Pasuruan, 02 Januari 2024

KEPALA BIDANG KETAHANAN
BANGSA DAN KEMASYARAKATAN


BUDIYONO, SH
NIP. 196707281989101001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYAH MINDI ASTUTI, SH
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
Jabatan : PLT. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 January 2024

Pihak Kedua,
PLT. SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP. 197005302003121004

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

DIYAH MINDI ASTUTI, SH
NIP. 196703281989032004

PERJANJIAN KINERJA**ESELON IV**

NAMA : DIYAH MINDI ASTUTI, SH
NIP : 196703281989032004
PANGKAT / GOL. : PENATA TINGKAT I / III-D
JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / 9
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	10
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	48
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	15
15	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 34.820.400,00	
2	Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp 1.894.900,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.844.300,00	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.182.100,00	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.204.400,00	
6	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 26.400.000,00	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 118.882.400,00	
8	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 41.285.000,00	
9	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.347.000,00	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 92.933.000,00	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 264.795.650,00	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 105.670.000,00	
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.320.000,00	
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 74.806.520,00	
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 9.150.000,00	
JUMLAH		Rp 833.535.670,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Ht. SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP. 197005302003121004

Pasuruan, 2 January 2024

KEPALA SUBBAKSIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

DIYAH MINDI ASTUTI, SH
NIP. 196703281989032004

[illegible]

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 34.820.400,00	
2	Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp 1.894.900,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.844.300,00	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.182.100,00	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.204.400,00	
6	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 26.400.000,00	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 118.882.400,00	
8	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 41.285.000,00	
9	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.347.000,00	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 92.933.000,00	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 264.795.650,00	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 105.670.000,00	
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.320.000,00	
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 74.806.520,00	
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 9.150.000,00	
JUMLAH		Rp 833.535.670,00	

Mengetahui,
 Pejabat Atasan Langsung
 PLT. SEKRETARIS
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



MUHAMMAD YUSUF LUKMANTO, SE, MM
 NIP. 197005302003121004

Pasuruan, 2 January 2024

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
 KEPEGAWAIAN



DIYAH MINDA ISTUTI, SH
 NIP. 196703281989032004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERWIN KRISSANTO, S.AB. MM
Jabatan : PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA%%(PENGURUS BARANG PENGGUNA)

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DIYAH MINDI ASTUTI, SH
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN%%
(PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG)

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 20 Desember 2023

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN%%(PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG)

DIYAH MINDI ASTUTI, SH
NIP. 196703281989032004

Pihak Pertama,
PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN
SARANA DAN PRASARANA%%(PENGURUS
BARANG PENGGUNA)

ERWIN KRISSANTO, S.AB. MM
NIP. 197903172010011010

PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PELAKSANA

NAMA : ERWIN KRISSANTO, S.AB
NIP : 197903172010011010
PANGKAT / GOL. : PENATA Tk I / III-d
JABATAN / KELAS JABATAN : PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA%%(PENGURUS BARANG PENGGUNA) / 7
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terakomodir dan Terinventarisasi data barang milik Daerah	Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana yang terdokumentasikan	4
2	Terselesaikannya jumlah laporan barang milik Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan barang milik daerah yang disusun	30

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN%%(PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG)


DIYAH MINDI ASTUTI, SH
NIP. 196703281989032004

Pasuruan, 20 Desember 2023

PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN
SARANA DAN
PRASARANA%%(PENGURUS BARANG
PENGGUNA)


ERWIN KRISSANTO, S.AB.MM
NIP. 197903172010011010

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PELAKSANA**

NAMA : ERWIN KRISSANTO, S.AB
 NIP : 197903172010011010
 PANGKAT / GOL. : PENATA Tk I / III-d
 JABATAN / KELAS JABATAN : PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA%%(PENGURUS BARANG PENGGUNA) /7
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																								%		
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			JML	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Terwujudnya dan Termentransparansi data barang milik Daerah	Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana yang terdokumentasikan	Laporan	2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		4		
2	Termentransparansi jumlah laporan barang milik Daerah yang terakumulasi	Jumlah Laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	0		1		1		6		1		1		3		1		1		5		2		6		30		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

Mengetahui,
 Pejabat Atasan Langsung
 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
 KEPEGAWAIAN%%(PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA
 BARANG)

DIYAH MINDI ASTUTI, SH
 NIP. 196703281989032004

Pasuruan, 20 Desember 2023

PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN
 SARANA DAN
 PRASARANA%%(PENGURUS BARANG
 PENGGUNA)

ERWIN KRISSANTO, S.AB.MM
 NIP. 197903172010011010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIKHUL, SH
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DIYAH MINDI ASTUTI, SH
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG)
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 20 December 2023

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN (PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG)


DIYAH MINDI ASTUTI, SH
NIP. 196703281989032004

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


SAIKHUL, SH
NIP. 197502142007011014

PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PELAKSANA

NAMA : SAIKHUL, SH
NIP : 197502142007011014
PANGKAT / GOL. : III/A
JABATAN / KELAS : PENGADMINISTRASI UMUM / 5
JABATAN :
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terdokumentasinya Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah dokumen yang didokumentasikan	520
2	Terdistribusinya Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah dokumen yang didistribusikan	520
3	Tersusunnya Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang disusun	355

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN (PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGUNA BARANG)


DIYAH MINDI ASTUTI, SH
NIP. 196703281989032004

Pasuruan, 20 December 2023

PENGADMINISTRASI UMUM


SAIKHUL, SH
NIP. 197502142007011014

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN PELAKSANA

NAMA : SAIKHUL, SH
 NIP : 197502142007011014
 PANGKAT / GOL. : III-A
 JABATAN / KELAS JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM /5
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN : 2024

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																								%		
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			JML	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Terdokumentasinya Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah dokumen yang didokumentasikan	dokumen	40		50		35		40		45		40		45		50		45		45		40		45		32	0	
2	Terdistribusinya Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah dokumen yang didistribusikan	dokumen	40		50		35		40		45		40		45		50		45		45		40		45		32	0	
3	Tersusunnya Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang disusun	dokumen	30		30		30		30		30		30		25		40		15		35		30		30		15	5	
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAF BULAN																														

Mengetahui,
 Pejabat Atasan Langsung
 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
 KEPEGAWAIAN (PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG)

DIYAH MINDI ASTUTI, SH
 NIP. 196703281989032004

Pasuruan, 20 December 2023

PENGADMINISTRASI UMUM

SAIKHUL, SH
 NIP. 197502142007011014